

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberlakuan otonomi ini dikarenakan negara Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah, suku, budaya sehingga setiap daerah akan memiliki kebutuhan sesuai dengan kondisi daerahnya masing – masing. Dengan begitu pemerintah pusat tentulah tidak akan mampu untuk mengatur segala kebutuhan yang ada di daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat men – desentralisasikan sebagian kewenangan kepada daerah untuk mengatur segala urusan daerah masing – masing karena yang mengetahui segala kebutuhan dan kondisi daerah adalah daerah tersebut sendiri. Sehingga kegiatan pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan hak untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada untuk dikelola oleh daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan seluruh sumber – sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien yang nantinya akan berdampak pada pemerataan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah terus dilakukan dan menjadi salah satu langkah utama pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Karena memang faktanya

pembangunan daerah di Indonesia masih terbelang belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia khususnya pada daerah – daerah tertinggal seperti kawasan desa. Berikut adalah data jumlah angka kemiskinan di Indonesia yang diklasifikasikan berdasarkan wilayahnya:

Tabel 1.1

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa)					
	2020			2019		
	Smt 1 (Maret)	Smt 2 (Sept)	Tahunan	Smt 1 (Maret)	Smt 2 (Sept)	Tahunan
Kota	11,16	-	-	9,99	9,86	-
Desa	15,26	-	-	15,15	14,93	-
Kota + Desa	26,42	-	-	25,14	24,79	-

Jumah kemiskinan di Indonesia tahun 2019 – 2020

Sumber : <https://www.bps.go.id/indicator/23/183/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>, diakses pada 1 Oktober 2020 pukul 23:03 WIB

Berdasarkan data diatas, terlihat adanya perbedaan jumlah angka kemiskinan yang cukup signifikan pada wilayah kota dan desa yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Pada tahun 2019 penduduk miskin di wilayah pedesaan mencapai 15,15 Juta jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 15.26 juta jiwa dibandingkan di wilayah perkotaan yang hanya mencapai 9,99 dan mengalami peningkatan menjadi 11,16 juta jiwa pada tahun 2020.

Adanya beberapa hal yang menjadi faktor penyebab ketimpangan tersebut, salah satunya terjadi karena kegiatan perekonomian yang berpusat pada kawasan perkotaan meliputi kegiatan pemerintahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Dengan begitu perputaran ekonomi di kota akan berjalan baik sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan.

Sedangkan pada daerah pedesaan lebih terfokus pada kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, selain itu banyaknya wilayah pedesaan yang terkadang sulit dijangkau sehingga menyebabkan pembangunan tidak berjalan semestinya. Sehingga dengan adanya hal tersebut pemerintah terus mengupayakan berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai upaya pemerataan kesejahteraan pada kawasan pedesaan dan juga sebagai pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dari sebuah negara, yang mana desa tidak hanya dipandang sebagai wilayah administratif atau tempat tinggal penduduk semata, melainkan sebagai entitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa harus terus dilaksanakan secara terencana dan menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat desa. Sesuai dengan adanya Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sumber dana tersebut dialokasikan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai alokasi dana desa yang dapat digunakan sebagai program pembangunan desa untuk mencapai desa maju dan mandiri . Oleh karena itu dengan disahkannya Undang - Undang Desa maka diprediksikan desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen 2014) dikutip dalam jurnal (Khoiriah, Siti, Meylina, 2017).

Dan juga secara tidak langsung desa telah diberikan otonomi desa untuk dapat menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan dengan baik dan optimal. Sehingga diperlukan penguataan kelembagaan desa, baik itu dari pemerintah desa atau lembaga desa lainnya.

BUMDesa merupakan salah satu kelembagaan ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial (Hilman & Nasution, 2019).

Keberadaan BUMDesa merupakan salah satu pilihan atau yang dapat dikembangkan untuk memperkuat posisi desa dalam menggerakkan aktifitas ekonomi yang mandiri guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh BUMDesa. Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDesa telah diatur di dalam Permendesa PD/TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang meliputi : bisnis sosial (*social business*) sederhana, bisnis penyewaan (*renting*) barang, usaha perantara (*brokering*), bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu, bisnis keuangan (*financial business*), usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha

yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.

Dalam jenis usaha bersama (*holding*) yang dijalankan oleh BUMDesa salah satunya dapat dilakukan dengan pembuatan dan pengembangan desa wisata yang memanfaatkan potensi dan sumber daya desa. Pemanfaatan sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu peluang dalam upaya pembangunan desa. Dalam pengelolaan pariwisata BUMDesa dituntut untuk memiliki strategi atau upaya upaya sebagai jalan pengembangan pariwisata. Sehingga dari berbagai upaya yang dilakukan oleh BUMDesa ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kemampuan keuangan desa yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan Anggaran Pendapatan Desa (APDes).

Dalam pembuatan desa wisata, pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa akan disesuaikan dengan keadaan geografis, sosial budaya, adat istiadat desa, yang mana jika dikelola dengan baik akan dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Penguatan pada sektor pariwisata dipilih karena memiliki potensi untuk membantu meningkatkan perekonomian Negara Indonesia. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Taiwan mengenai pengembangan pariwisata yang memberikan dampak pada perekonomian masyarakatnya yaitu, *The results of tourism impact studies have identified residents' perceived tourism impact regarding economic, sociocultural, and environmental benefits and costs* (Andereck & Jurowski, 2006; Jurowski, 1994; Marcouiller, 1997) dikutip dalam jurnal (Yu, Huang, Yeh, & Chao, 2017). Yang mana dari hasil penelitian tersebut,

dijelaskan bahwa sektor pariwisata dapat memberikan dampak yang cukup baik pada bidang ekonomi, sosial dan juga lingkungan.

Dalam program pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh BUMDesa, penerapan model *One Village One Product* dapat digunakan sebagai motivasi desa untuk terus mengembangkan potensi desa terutama dibidang pariwisata. Dalam menerapkan model OVOP, dengan mengejar strategi spesialisasi, setiap desa dapat mengidentifikasi satu atau dua produk (barang atau jasa) yang pada akhirnya akan menciptakan citra spesifik untuk menarik minat pengunjung untuk datang berwisata (Ning Li, 2013) dikutip di dalam jurnal (Puspita Sari & Meirinawati, 2020). Pembentukan desa wisata yang dilakukan oleh BUMDesa diharapkan dapat membantu pengembangan desa. Seperti yang diungkap oleh Pearce (1995) dikutip dalam jurnal (Sidiq & Resnawaty, 2017) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Menurut Sastrayuda (2010:15) dikutip dalam (Azis & Meirinawati, 2020) produk dari desa wisata merupakan hal yang harus diutamakan dalam berjalannya roda pariwisata.

Bojonegoro yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur yang hampir sebagian besar daerahnya merupakan pedesaan. dapat diketahui bahwa dari 423 desa yang di Bojonegoro di Kabupaten Bojonegoro baru 3 desa yang dikategorikan sebagai desa Mandiri, 74 desa maju, 323 desa Berkembang dan 19 desa Tertinggal. Sehingga dengan adanya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menekankan adanya 17 Program dan

Kegiatan Prioritas Pemkab Bojonegoro terkait Desa Tahun 2020. Seperti dilansir dari kabarpasti.com, sebagai berikut :

“Di Bojonegoro dalam perencanaan desa tahun 2020 ini, sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Desa dalam upaya mendukung optimalisasi capaian 17 (tujuh belas) program prioritas Pemkab Bojonegoro yang berskala Desa serta peningkatan status desa rupanya juga telah dilakukan. Sektoral Kecamatan sebagai kepanjangan tangan Bupati diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pemerintah Desa tahun 2020. Melalui surat Nomor : 141/7173/412.211/2019 tertanggal 16 Desember 2019, Bupati Bojonegoro menekankan Program dan Kegiatan Prioritas Pemkab Bojonegoro terkait Desa Tahun 2020 diantaranya adalah, *Pertama*, mendorong Pemdes agar lebih optimal memanfaatkan Dana Desa (DD) berdasar Tipologi Desa dan tingkat kemajuan Desa serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDPT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Kedua, mengoptimalkan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk membiayai kegiatan yang mendukung kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa atau yang belum terakomodir dalam pembiayaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, mendukung optimalisasi penanganan Stunting, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta percepatan Open Defecation Free (ODF) dimana ketiganya adalah kegiatan yang saling terkait.

Keempat, pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) dengan penyediaan anggaran Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Desa. Karena Pengembangan dan pengelolaan SID sebagai sarana mewujudkan transparansi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa.

Kelima, Pengembangan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product). Tahun ini diharapkan semua desa dapat mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mewujudkan ini, setidaknya mampu menciptakan embrio agar kedepan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Desa.

Keenam, Pencegahan dan penanganan Bencana Alam karena wilayah Bojonegoro rentan terhadap bencana, maka optimalisasi penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk kegiatan penanggulangan bencana alam.

Ketujuh, Tanggap Darurat Bencana Alam. Segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat, Dana Desa dapat digunakan untuk pembiayaan tanggap darurat bencana alam sesuai ketentuan yang ada.

Kedelapan, pencapaian target peningkatan status desa di Bojonegoro pada tahun 2020. Dalam Indeks Desa Membangun tahun 2019 di Kabupaten Bojonegoro baru memiliki 3 Desa Mandiri, 74 Desa Maju, 323 Desa Berkembang dan masih ada 19 Desa Tertinggal meski nihil Desa Sangat tertinggal. *(Shint/Red)*

Sumber: (<https://kabarpasti.com/terkait-desa-tahun-2020-ini-kegiatan-dan-program-prioritas-pemkab-bojonegoro/>) diakses pada tanggal 7 oktober 2020 pukul 14:24 WIB

Berdasarkan berita diatas, bahwa desa menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam optimalisasi program pembangunan daerah. Yang mana di dalam pelaksanaan program prioritas tersebut harus di dukung oleh pemerintah desa dan lembaga terkait sebagai bentuk sinergi pembangunan desa. Dengan adanya program prioritas tersebut desa diharapkan mampu bangkit menjadi desa yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Pilanggede merupakan salah satu desa yang terletak Kabupaten Bojonegoro yang telah berhasil mengembangkan potensi desa yang dilakukan oleh BUMDesa melalui pembangunan sebuah obyek wisata. Desa Pilanggede merupakan salah satu desa yang telah menyandang status desa mandiri di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 yang beberapa tahun sebelumnya merupakan sebuah desa tertinggal. Desa Pilanggede memiliki area persawahan dengan luas mencapai 1.800Ha sehingga mayoritas mata pencaharian

masyarakatnya adalah petani. Meskipun memiliki area persawahan yang sangat luas, namun masih banyak masyarakat Desa Pilanggede yang hanya bekerja sebagai buruh tani. Sehingga taraf hidup masyarakatnya masih belum merata. Hal tersebutlah yang membuat kepala desa Pilanggede mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan PADes dan juga memberdayakan masyarakat sebagai upaya pembangunan desa. Karena adanya keinginan dan usaha yang keras akhirnya Desa Pilanggede berhasil meraih predikat sebagai desa mandiri dimulai sejak tahun ini. Pencapaian tersebut diarahkan atas usaha dari seluruh elemen masyarakat dan juga keberhasilannya untuk memanfaatkan potensi desa melalui pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata dilakukan melalui pembangunan sebuah desa wisata. Yang unik dari desa wisata ini adalah pemanfaatan panorama Sungai Bengawan Solo sebagai daya tarik wisata.

Desa Pilanggede merupakan desa yang berbatasan langsung dengan sungai Bengawan Solo. Yang mana hampir setiap tahunnya sungai Bengawan Solo akan meluap jika intensitas hujan yang sangat tinggi. Sehingga ancaman bencana banjir dapat terjadi sewaktu – waktu. Berikut adalah data bencana banjir yang terjadi di Desa Pilanggede.

Tabel 1.3
Kerugian Akibat Bencana Banjir di Kecamatan Balen tahun 2014 - 2019

No	Nama Desa	Kerugian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	KedungDowo	226jt		3 jt		150jt
2.	Pilanggede	150jt		20,5 jt	23jt	10 jt

3.	Sarirejo	-		4,5 jt	45jt5	9 jt
4.	Sekaran	15,2jt		7,5 jt	50jt	-
5.	Lengkong	-		37,5 jt	-	60 jt
6.	KedungBondo	413,7 jt		-	-	20 jt
7.	Mulyorejo	22,5jt		-	56jt	20 jt
8.	Mulyoagung	-		-	-	-
9.	Prambatan	-		-	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, 2020

Berdasarkan data diatas, hampir setiap tahunnya Desa Pilanggede mengalami bencana banjir dengan kerugian yang cukup besar. Kerugian yang dialami sebagian besar disebabkan oleh terendahnya area persawahan, yang mana Desa Pilanggede memiliki luas area persawahan yang mencapai 1800 Ha. Namun, hal tersebut tidak dijadikan sebagai hambatan Desa Pilanggede untuk melakukan pengembangan desa dengan memanfaatkan potensi desa yang ada walaupun terletak pada daerah yang rawan dengan banjir.

Dengan adanya potensi yang dimiliki tersebut, akhirnya pemerintah desa bersama dengan BUMDesa Pilanggede Gemilang akhirnya di buatlah sebuah wisata berbasis desa wisata yang sebelumnya telah melakukan evaluasi dan observasi. Sehingga berdirilah Taman Pinggir Gawan (TPG) Desa Pilanggede yang menonjolkan Bengawan Solo sebagai ciri khas dari wisata ini yang dikelola oleh BUMDesa dibantu oleh Pokdarwis. Desa Wisata Taman Pinggir Gawan ini baru diresmikan pada tanggal 9 November 2019 yang bersamaan dengan diadakannya festival bengawan.

Desa wisata Taman Pinggir Gawan menyuguhkan pemandangan tepi Bengawan Solo dengan angin semilir. Terdapat pula spot spot foto kekinian yang menjadi incaran para wisatawan. Selain itu juga disediakan arena bermain anak seperti adanya ATV dan Motor Trill. Pengunjung juga dapat menikmati wahana speed boat. Hal tersebut yang menjadikan keunikan dari desa wisata ini. Baru beberapa bulan dibuka, pengunjung Taman Pinggir Gawan telah mencapai ribuan terutama pada hari – hari libur sekolah. Berikut adalah jumlah data pengunjung dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret.

Tabel 1.4
Jumlah wisatawan TPG bulan November s/d Maret

No	Kategori	Bulan				
		November	Desember	Januari	Februari	Maret
1.	Tiket Masuk TPG	3477	14.285	17.667	6.638	2.440
2.	TRAIL	594	1.635	925	427	180
3.	ATV	156	610	380	157	53
4.	Kapal boat	0	320	631	110	23

Sumber : BUMDesa Pilanggede Gemilang, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jika jumlah pengunjung terus mengalami peningkatan terutama pada bulan Desember dan Januari. Pada bulan pertama dibuka jumlah pengunjung mencapai 3.447, pada bulan desember mengalami peningkatan pesat jumlah pengunjung mencapai angka 14.285

dikarenakan musim liburan akhir tahun, peningkatan juga terjadi pada bulan Januari bahkan jumlah pengunjung 17.667, hal tersebut dikarenakan libur sekolah dan libur pergantian tahun. Mulai bulan Februari mengalami penurunan, jumlah pengunjung hanya mencapai 6.638. Ketika memasuki bulan Maret jumlah pengunjung pada minggu pertama mencapai 2.440 , dikarenakan adanya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan desa wisata TPG ditutup sementara sampai batas waktu yang masih belum bisa ditentukan. Selain dari penjualan tiket masuk yang cukup banyak, desa wisata TPG juga menyediakan berbagai wahana pilihan. Dengan wahana Trill yang sangat diminati anak – anak. Dengan adanya wahana tambahan tersebut maka akan menambah pemasukkan desa wisata TPG. Sehingga Jika dilihat dari jumlah pengunjung desa wisata TPG yang cukup banyak maka pendapatan yang diperoleh dari desa wisata TPG juga akan meningkat.

Tabel 1.5
Jumlah pendapatan TPG bulan November s/d Maret

No	Kategori	Bulan				
		November	Desember	Januari	Februari	Maret
1.	Tiket Masuk TPG	Rp. 15.110.000	Rp. 73.292.000	Rp. 53.001.000	Rp. 19.914.000	Rp. 7.320.000
2.	TRAIL	Rp. 5.940.000	Rp. 16.350.000	Rp. 9.250.000	Rp. 4.270.000	Rp. 1.800.000
3.	ATV	Rp. 2.340.000	Rp. 9.150.000	Rp. 5.700.000	Rp. 1.600.000	Rp. 795.000

4.	Kapal boat	Rp. 0	Rp. 6.400.000	Rp. 7.180.000	Rp. 2.355.000	Rp. 340.000
----	---------------	-------	------------------	------------------	------------------	----------------

Sumber : BUMDesa Pilanggede Gemilang, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat jika jumlah pendapatan yang diperoleh dari desa wisata TPG cukup besar. Dengan klasifikasi harga tiket Rp. 5000,- rupiah, Trail Rp. 10.000,- rupiah, ATV Rp. 15.000,- rupiah, Kapal Boat Rp. 20.000,- rupiah. Pada bulan November sampai dengan Desember penjualan tiket masih diakumulasikan sepenuhnya Rp.5000,- rupiah, namun sebenarnya ada pembagian jumlah yaitu Rp.3000,- rupiah untuk tiket masuk dan Rp. 2000,- rupiah untuk snack. Jadi tiket seharga Rp. 5000,- rupiah sudah include dengan snack produk asli masyarakat Desa Pilanggede. Namun ketika memasuki bulan Januari, data yang di masukkan dihitung menjadi harga asli yaitu Rp.3000,- rupiah dan sisanya langsung dimasukkan pada perhitungan snack. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pembuatan laporan.

Jika dilihat dari pendapatan Desa Wisata TPG yang cukup besar, maka hal tersebut akan mempengaruhi hasil PADes karena sebanyak 30% hasil dari Desa Wisata TPG akan masuk ke dalam PADes, 50% untuk pengembangan wisata, dan 20% untuk penggajian karyawan. Dengan pencapaian yang begitu luar biasa maka tidak lepas dari sebuah upaya kerjasama dan semangat luar biasa dari Kepala desa, BUMDesa Pilanggede Gemilang, Pokdarwis, dan seluruh karyawan dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata TPG. Yang membuat desa wisata TPG ini untuk bisa terus dinikmati oleh masyarakat. Sehingga BUMDesa selaku pengelola sekaligus tim pengembangan wisata terus berupaya melakukan strategi

pengembangan dan menciptakan inovasi – inovasi baru agar desa wisata TPG semakin dikenal dan adanya strategi strategi khusus mengingat TPG ini terletak pada tepi bengawan solo yang sangat rawan terjadinya banjir. Karena sebagai salah satu upaya untuk tetap memperhatikan keamana dan keselamatan pengunjung desa wisata TPG ini.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Strategi BUMDesa Dalam Pengembangan Desa Wisata Taman Pinggir Gawan (TPG) Desa Pilanggede Kecamatan Balen Bojonegoro”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan adanya latar belakang dan data - data diatas sekiranya dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana strategi BUMDesa dalam pengembangan desa wisata TPG Desa Pilanggede Kecamatan Balen Bojonegoro?”

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu: “Untuk mengetahui strategi BUMDesa dalam pengembangan desa wisata TPG Desa Pilanggede Kecamatan Balen Bojonegoro”.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

- a. Penelitian ini berguna untuk menunjang pendidikan dan bahan pembandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan referensi kepada penulis pada program studi Ilmu Administrasi

2. Bagi Mahasiswa

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dalam pengembangan desa wisata.
- b. Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Ilmu Administrasi Publik.

3. Bagi Badan Usaha Milik Desa Pilanggede Gemilang

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, saran, dan masukan kepada pemerintah desa, BUMDesa Pilanggede Gemilang dalam proses perencanaan strategi pengembangan wisata agar dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga desa wisata Taman Pinggir Gawan dapat bersaing dengan pariwisata lain dan menjaga eksistensinya dan membawa dampak positif bagi masyarakat khususnya membawa dampak baik pada bidang ekonomi.